

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah Perkembangan sektor publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah akan memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk selalu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik itu yang menyangkut sumber daya manusia, sumber pembiayaan, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena kegagalan pengukuran kinerja seringkali disebabkan oleh tidak adanya sistem pengukuran kinerja formal yang menginformasikan tingkat keberhasilan instansi dan keterbatasan SDM disebabkan ada beberapa pegawai sudah tidak bekerja dengan biasanya dikarenakan sudah pensiun atau sudah berakhir masa kerjanya,

Akuntansi sektor publik termasuk bidang akuntansi yang masih baru di Indonesia, namun dalam waktu relatif singkat telah mengalami perkembangan secara pesat. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah dan publik. Saat ini, terdapat perhatian besar bagi praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik lembaga sektor pemerintahan maupun Lembaga publik non-pemerintahan. Namun, dalam realisasinya menurut Mardiasmo, (2018) organisasi sektor publik dianggap sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya kompetensi pegawai organisasi sektor publik dalam pengelolaan anggaran. Keadaan ini mengisyaratkan untuk dilakukan pengukuran kinerja terhadap hasil kerja pada organisasi sektor publik.

Keuangan daerah harus dikelola dengan baik karena, akan berpengaruh terhadap perkembangan kinerja pemerintah daerah serta dapat meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya tuntutan akuntabilitas publik dari masyarakat diharapkan akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat atau penerima Amanah yang dalam pelaksanaannya dituntut agar dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat sebagai pemilik sumber daya. Sehingga apabila Pemerintah daerah dapat melaksanakan secara baik dan akan mampu mewujudkan tata kelola keuangan serta dapat meningkatkan sumber daya publik yang dikelolanya, mengingat tolak ukur adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah salah satunya yaitu kemampuan dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah mempunyai peranan yang penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mengukur kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai upaya dalam terwujudnya *good governance*. Ulum (2005)

Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep *good governance* semakin diisyaratkan untuk dilaksanakan pemerintah seiring dengan adanya reformasi yang menumbuhkan otonomi daerah. Dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Namun diantara berbagai adopsi, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang disepakati oleh institusi dan diakui sebagai karakteristik *good governance*, diantaranya yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. CUI-ITB, (2010).

Karakteristik pelaksanaan *good governance*, antara lain *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency* dan *effectiveness*, serta *accountability*. Dari karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, *value for money*, dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat yang efektif mempengaruhi *good governance*. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya isu bahwa *good governance* merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas. Faktor yang dapat mempengaruhi *good governance* dan merupakan pilar umum dari *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selain itu terdapat *value for money* yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Namun beberapa penelitian tersebut sebagian besar merupakan penelitian kualitatif, dan lebih melihat hubungan keempat variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, prediktabilitas, maupun *value for money* (VFM) dengan kinerja pemerintahan. Oleh karenanya penelitian ini berupaya mengembangkan beberapa penelitian tersebut, dengan pendekatan kualitatif, sehingga dapat dibuktikan secara statistik pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, maupun *value for money* (VFM) dengan *good governance*. Jhon Andra (2010).

Dalam suatu organisasi sektor publik, pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban organisasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum dan supaya tepat sasaran. Terdapat tiga hal yang menjadi alasan mengapa pengukuran kinerja penting untuk dilakukan, antara lain untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan serta mengimplementasikan pertanggungjawaban kepada publik. Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber dananya, tak lepas dari tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Terdapat desa yang mampu mengelola keuangan desanya dengan baik, namun ada pula desa yang belum mampu memaksimalkan anggaran dana yang diperolehnya. Yulitiawati & Rusmidarti (2021)

Pengukuran kinerja yang terdapat dalam pemerintah desa dapat ditinjau melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang merupakan bentuk manifestasi dari tata kelola pemerintahan. Pendapatan dan belanja desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja baik. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam proses penyusunan karena masyarakat lebih mengetahui persoalan dan potensi sumber daya yang ada. Priandani et al., (2017).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan adalah 43,3 % dari total seluruh penduduk yaitu 272.229.372 jiwa Administrasi Kependudukan (Admuduk), 2021. Tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan dilihat dari aspek pembangunan wilayah dapat dinilai masih tertinggal jika di bandingkan dengan perkotaan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 13,45% pada kuartal III tahun 2019. Jumlah tersebut merupakan urutan kedua setelah sektor Industri yaitu sebesar 19,62%. Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian akan sulit menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa, apalagi banyak petani yang tidak mempunyai sawah sendiri, melainkan hanya sebagai petani gurem. Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa perlu meningkatkan pemberdayaan ekonomis masyarakat menggunakan pendapatan dan belanja desa. Dalam praktiknya, APBDes memiliki pengaruh yang cukup besar untuk proses pembangunan desa. Itulah alasan kenapa peneliti mengambil APBDes sebagai bahan penelitian

Immanuel R. A. Poli (2020) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *value for money*. Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja pemerintah Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode analisis yang digunakan dalam

penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Indrayani dan Khairunnisa (2018), meneliti tentang Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *value for money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2014-2016 bernilai ekonomis, secara keseluruhan telah efisien, sedangkan hasil rasio efektivitas menunjukkan kinerja pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.

Cindy Kareima Waney. (2018), dalam penelitiannya meneliti tentang Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kriteria efektivitas dan kriteria efisiensi secara keseluruhan sudah diolah dengan baik.

Untuk itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Alasan pemilihan pemerintah kabupaten Lombok Tengah dikarenakan memiliki pendapatan daerah yang tinggi dan didukung oleh pariwisata yang sangat berkembang sehingga dengan pendapatan yang tinggi tersebut dapat mengolah kinerja keuangannya dengan baik atau sebaliknya. Sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan metode *value for money*”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Lombok Tengah bila diukur dengan metode *value for money*, Ekonomis, Efektivitas, Efisiensi?

## **C. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengukur kinerja Kabupaten Lombok Tengah diukur dengan metode *value for money* 2019-2022 ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan konsep *value for money*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lombok Tengah guna perbaikan dan pengembangan kinerja.

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan sektor publik, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money*